

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pada era globalisasi sekarang ini terdapat kecenderungan bahwa sebuah negara tidak akan dapat hidup untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, tanpa berinteraksi dengan aktor-aktor internasional lainnya, baik itu melalui hubungan bilateral, multilateral ataupun melalui organisasi internasional. Hal ini karena kebutuhan suatu negara sifatnya adalah tidak terbatas, namun di lain pihak sumber daya yang dimiliki suatu negara sifatnya adalah terbatas. Fakta inilah yang kemudian mendorong mekanisme kerjasama internasional dari negara-negara dunia yang terepresentasi atas implementasi politik luar negeri sebagai bagian integral dari kerjasama internasional.

Periode tahun 2004-2007 merupakan masa penting bagi orientasi politik luar negeri Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepentingan nasional (*national interest*) Indonesia, yang salah satunya terealisasi melalui hubungan bilateral dengan Singapura. Sejak dekade tahun 1990-an, saat Indonesia berada dibawah kekuasaan rezim Orde Baru, hubungan antara Indonesia-Singapura cenderung fluktuatif, yang terkadang dapat berlangsung secara harmonis, namun terkadang juga diwarnai oleh berbagi friksi (gesekan) diantara kedua negara.

Hubungan politik, ekonomi, perdagangan, investasi, penegakan hukum, keamanan, sosial, tenaga kerja, antara Indonesia dan Singapura mengalami

dinamika ketegangan konflik, persaingan kerjasama. Sudah ada penulisan skripsi yang membahas hubungan bilateral Indonesia-Singapura di era Sukarno, era Suharto, era Baharuddin Jusuf Habibie dan era Megawati Soekarnoputri. Sedangkan era Susilo Bambang Yudhoyono belum ada yang menuliskannya, sehingga hal inilah yang kemudian menjadi momentum penting untuk dibahas lebih lanjut sebagai kajian karya skripsi.

Keadaan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura di era 2004-2007, yang mempunyai isu berbeda dengan latar belakang masalah yang berbeda, namun tetap terjalin hubungan bilateral yang kokoh dan saling menguntungkan. Berdasarkan pada fakta tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan memilih judul tentang “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Singapura Era Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2007”. Disamping itu, alasan lainnya bagi penulis dalam memilih tema tersebut karena masalah ini masih menjadi isu yang mengemuka “*up to date*” sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri, serta pihak-pihak yang membutuhkan referensi tentang dinamika hubungan bilateral Indonesia-Singapura pada periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hubungan bilateral antara Indonesia-Singapura yang saling atas dasar saling membutuhkan, ternyata juga memiliki beberapa ganjalan yang menjadikan hubungan kedua negara sangat fluktuatif (pasang-surut) akibat adanya beberapa isu yang sudah muncul pada masa pemerintahan Presiden

Megawati Soekarnoputri. Permasalahan–permasalahan yang muncul dan mengganjal terhadap orientasi hubungan bilateral kedua negara yang kemudian mengarah kepada alasan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Singapura ini menjadikan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintahan baru pasca era Megawati yaitu era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>1</sup>

Beberapa problematika hubungan bilateral Indonesia-Singapura dari rezim Megawati hingga era rezim Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2007, terdapat beberapa isu yang mengemuka pada bidang politik, ekonomi, sosial-kebudayaan dan pertahanan keamanan, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

## **1. Politik**

Apabila ditinjau dari bidang politik hubungan bilateral Indonesia–Singapura pasca kepemimpinan presiden Megawati banyak mengalami pasang surut. Tampilnya pemerintahan baru di Indonesia sejak 20 Oktober 2004 dan Singapura 12 Agustus 2004, telah memberikan momentum baru bagi hubungan Indonesia–Singapura pada periode waktu kedepan. Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono hendak mengembangkan kerjasama dengan Singapura dengan pola baru yang tidak lagi menggantungkan pada faktor kedekatan hubungan antar elit politik yang sempit antar kedua

---

<sup>1</sup> “Singapura Masih Menjadi Mitra Kerjasama Yang Strategis”, *Media Indonesia*, 7 Agustus 2001.

negara dan ingin mendorong kemajuan hubungan bilateral yang menjangkau spektrum elemen seluas mungkin.

Kesempatan untuk saling mengunjungi antar kepala pemerintahan kedua negara dan pejabat tinggi lainnya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indikasi positif ini telah mendorong pengembangan sektor-sektor kerjasama yang saling menguntungkan dan kemajuan upaya penyelesaian isu-isu yang masih ada. Kunjungan perdana menteri Singapura, Lee Hsien Loong, ke Jakarta, baik pada Susilo Bambang Yudhoyono waktu upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden pada 20 Oktober 2004 dan kunjungan perkenalan serta sekaligus juga pertemuan bilateral Indonesia–Singapura pada 8 November 2004 di Jakarta merupakan perwujudan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia–Singapura yang perlu dilihat berdasar perspektif kemanfaatan timbal balik yang proposional.

Berbagai isu bilateral yang belum terselesaikan, antara lain delimitasi batas maritim, penataan kembali atau pengambilan alihan pengelolaan *flight information region* diatas kepulauan Riau, perjanjian ekstradisi koruptor, perjanjian tentang *military training areas (Defense Cooperation Agreement – DCA)* bagi militer Singapura diruang udara Indonesia, persetujuan pengembangan sumber daya air.<sup>2</sup>

Secara politis, upaya peningkatan hubungan bilateral Indonesia–Singapura, baik untuk penyelesaian *outstanding issues* maupun pengembangan sektor-sektor baru dalam kerjasama bilateral , memiliki peluang yang cukup

---

<sup>2</sup> “Bilateral Relation Between Indonesia and Singapore”, Embassy of Republic Indonesia of Singapore, <http://www.kbrisingapura.com>., diakses pada tanggal 23 Oktober 2008.

optimistik. Hal ini sesuai dengan sikap pemerintah Singapura yang disampaikan oleh perdana menteri Lee Shien Loong dalam pidato pelantikannya sebagai perdana menteri yang baru, intinya bahwa Indonesia adalah “*special importance*” bagi Singapura. Kemudian, dalam pembicaraan dengan Presiden Republik Indonesia pada 8 November 2004 di Jakarta, Perdana Menteri Lee juga menyatakan bahwa pembicaraan serta penyelesaian masalah-masalah yang ditunda antara Indonesia dan Singapura hendaknya dilakukan secara konstruktif.<sup>3</sup>

## **2. Ekonomi**

Pada dasarnya kedua negara memiliki tingkat komplementaritas (saling mengisi dan menguatkan) ekonomi yang tinggi. Di satu sisi Singapura mempunyai keunggulan di sektor *knowledge, networking, financial resources* dan *tecnological advance*, sedangkan dilain pihak Indonesia memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah serta tersedianya tenaga kerja yang kompetitif. Hubungan ekonomi bilateral kedua negara yang mencerminkan sifat komplementaritas termasuk sektor industri pariwisata yang secara konseptual kedua negara memiliki dasar kerjasama yang sangat erat, antara lain melalui *joint promotions* untuk sektor industri pariwisata.

Pada era Megawati Soekarnoputri pangsa pasar Indonesia di Singapura masih relatif kecil. Berdasarkan data yang diperoleh dari *International Enterprise* (IE) Singapura, pada 2003, volume perdagangan Indonesia–

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Singapura mencapai nilai 26,1 juta Dollar Singapura, terdiri dari nilai ekspor Indonesia 14,5 juta Dollar Singapura dan nilai import 11,6 juta Dollar Singapura, meningkat 5,6 % apabila dibandingkan tahun 2002 yang mencapai nilai 24,7 juta Dollar Singapura. Dengan demikian di bawah ini data perdagangan Singapura dengan Indonesia pada 2002-2003:<sup>4</sup>

Produk dan komoditi Indonesia yang diperlukan oleh Singapura, antara lain peralatan elektronika (*electrical & electronic equipments*), minyak dan hasil olahannya (*petroleum dan petroleum product*), permesinan dan perabotan berbahan dasar kayu (*machinery and wood base product termasuk furniture*), tekstil dan konveksit, kimia (*chemical*), perhiasan, *construction material*, *agro based commodity* seperti karet (*rubber*), *cacao* dan lada.<sup>5</sup>

Singapura untuk sementara tidak dapat membeli pasir laut dari Indonesia karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia No.117/MPP/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003, pemerintah Indonesia menghentikan penjualan pasir laut ke Singapura sehubungan dengan isu-isu kasus ekspor pasir laut yang telah merugikan Indonesia trilyunan rupiah, menurut fakta yang ditemukan di lapangan bahwa sebagian besar pasir laut tersebut adalah pasir laut ilegal atau pasir laut curian dari Wilayah Kepulauan Riau yang diekspor melalui jalur penyelundupan.

Nilai investasi (*Foreign Direct Investment /FDI*) Singapura di Indonesia sejak dua tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2001, nilai FDI Singapura

---

<sup>4</sup> “Neraca Perdagangan Indonesia-Singapura 2003-2004”, <http://www.bexi.or.id>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2008.

<sup>5</sup> *Ibid.*

di Indonesia mencapai 1,1 miliar juta US Dollar, kemudian meningkat menjadi 3,3 miliar US Dollar pada 2002, namun pada 2003 dan 2004, terus menurun mencapai nilai masing-masing 692 juta US Dollar dan 131,8 juta US Dollar. Neraca perdagangan antara Indonesia dan Singapura selama lima tahun terakhir (2002-2006) menunjukkan posisi surplus bagi Indonesia pada tahun 2002 dan 2003, sedangkan pada tahun 2004 hingga 2006 Indonesia mengalami defisit masing-masing sebesar 84,9 juta US Dollar, 1635,3 juta US Dollar dan 1104,7 juta US Dollar.<sup>6</sup>

Defisit terjadi akibat impor migas yang besar dari Singapura ke Indonesia pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2004 defisit perdagangan migas sebesar 2948,2 juta US Dollar dan tahun 2006 tercatat sebesar 5195,4 juta US Dollar. Dalam perdagangan non migas, selama 2002-2006 Indonesia tetap surplus. Pada tahun 2006 tercatat surplus sebesar 4090,7 juta US Dollar, sedangkan tahun 2005 tercatat 4131,7 juta USD. Ekspor Indonesia ke Singapura pada tahun 2006 mencapai 8929,8 juta US Dollar, meningkat 13,9% dibandingkan tahun 2005 (7835,4 juta US Dollar). Ekspor migas tahun 2006 sebesar 1105,7 juta US Dollar, meningkat 44,5% dibandingkan tahun 2005.

Dinamika ekspor non migas tahun 2006 sebesar 7824,2 juta US Dollar, meningkat 10,7 % dari tahun sebelumnya. Impor Indonesia dari Singapura tahun 2006 mencapai 10034,5 juta US Dollar, meningkat 5,9% dari tahun 2005 (9470,7 juta US Dollar). Impor non migas tahun 2006 sebesar 3733,4 juta US Dollar, naik sebesar 27,1% dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 2936,9 juta

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

US Dollar. Sementara itu, import migas tahun 2006 sebesar 6301,1 juta US Dollar, menurun 3,5% dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 6533,9 juta US Dollar.<sup>7</sup>

Singapura juga mempunyai program “*Singapore – Riau Twinning*”, yang dimulai pada 2003 dengan tujuan untuk membantu pembangunan kawasan Riau sekaligus untuk mendukung industri di Singapura. Berkaitan dengan kerjasama ekonomi dan pariwisata, Indonesia dan Singapura telah memiliki:

- a. *Agreement on the promotion and protection of investment* dalam rangka pengembangan pulau Batam dan kepulauan Riau, 28 Agustus 1990 .
- b. *Agreement on Cooperation in the Promotion and Development of Tourism*, 29 September 1994.
- c. *Air Service Agreement*, 29 September 1994.

Pada tanggal 26 maret 2002 berhasil ditandatangani nota kesepahaman MoU (*memorandum of understanding*) antara Politeknik Batam dan Nanyang Polytechnic. Pada intinya kedua pihak sepakat untuk mengembangkan kerjasama teknik berupa pertukaran staf pengajar dan siswa. Dibidang ketenagakerjaan, di Singapura saat ini terdapat lebih kurang 50.000 orang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) dan 14 tenaga perawat Indonesia yang bekerja di rumah sakit *Gleneagles , Mount Elizabeth* serta *East Shore*.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

### **3. Sosial Budaya**

Pada bidang sosial-budaya, hubungan bilateral Indonesia Singapura ditandai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai kerjasama di bidang seni dan warisan budaya, yang ditandatangani pada 15 Agustus 1996, masing-masing oleh menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Penerangan dan Kesenian Singapura. Hubungan bilateral Indonesia–Singapura era Magawati sampai dengan era Susilo Bambang Yudhoyono dibidang sosial budaya terus mengalami peningkatan dan kerjasama antar lembaga kesenian serta kebudayaan kedua negara makin erat. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan bahkan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) Singapura senantiasa memenuhi permintaan dari berbagai lembaga kesenian, pendidikan dan kebudayaan Singapura dan indonesia untuk mengadakan kerjasama serta penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya. Disamping itu, Singapura melalui *The Peranakan Association of Singapore*, yang merupakan kumpulan orang-orang Cina dan Melayu Singapura keturunan Indonesia dan Malaysia juga turut memberikan kontribusi dalam peningkatan hubungan sosial budaya antar kedua negara.<sup>8</sup>

### **4. Pertahanan dan Keamanan**

Kerjasama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan meliputi kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama bilateral guna memberantas

---

<sup>8</sup> “Kebudayaan ASEAN : Indonesia-Singapura”, <http://www.hamline.edu>., diakses pada tanggal 23 Oktober 2008.

penyelundupan di selat Malaka, yang ditandatangani pada 24 juni 1992 ; kerjasama dibidang pendidikan, yakni diterimanya perwira Angkatan Bersenjata Singapura dalam pendidikan sesko (sekolah staf komando) angkatan, kerjasama mengenai penggunaan fasilitas latihan di Pekan Baru dan fasilitas latihan di Batu Jajar. Kerjasama lainnya juga mencakup latihan bersama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura, antara TNI-Angkatan Udara dengan Angkatan Udara Singapura, dan antara TNI-Angkatan Darat dengan Angkatan Darat Singapura.<sup>9</sup>

Gambaran tentang dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura diatas mengindikasikan sebuah kenyataan atas kualitas dan kuantitas hubungab bilateral yang masih jauh dari optimal pada periode kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Bahkan orientasi hubungan kedua negara sangat labil yang dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan (friksi) diantara kedua negara akibat minimnya kesepahaman diantara keduanya.

### **C. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas diatas maka dapat ditarik suatu pokok permasalahan yaitu :

“Apa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintahan Indonesia terhadap Singapura pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono agar hubungan

---

<sup>9</sup> “Kerjasmaa Pertahanan Indonesia-Singapura”, <http://www.dephan.go.id>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2008.

bilateral keduanya dapat saling mendukung dalam pencapaian tujuan kepentingan nasional Indonesia ?”

#### **D. Kerangka Dasar Teori**

Dalam rangka menjawab pokok permasalahan dan menarik hipotesa, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan sebagai media dalam mendukung dan membantu analisa-analisa aplikasi pada kasus dinamika politik luar negeri Indonesia terhadap Singapura pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa pendekatan utama yang digunakan adalah teori kepentingan nasional dan konsep kerjasama bilateral yang akan diuraikan sebagai berikut.

Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah sila-sila dalam Pancasila. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Hubungan Luar Negeri no. 37 tahun 1999, Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Sedangkan jika pemerintah daerah akan mengadakan hubungan luar negeri diatur dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia no.SK.03/A/OT/X/2003/01 panduan umum tata cara hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah.

Departemen luar negeri Indonesia adalah lembaga yang ikut serta bertugas mencapai tujuan kepentingan nasional Indonesia. Di luar negeri, dalam mencapai kepentingan nasional departemen luar negeri atau (Deplu) menggunakan landasan operasional yaitu daftar program kepentingan nasional

yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berlaku 5 tahun (2004-2009). Pencapaian program Bappenas dibidang luar negeri dijalankan oleh Departemen Luar Negeri yang mempunyai misi, visi dan program kerja prioritas 2004-2009.

Dalam mencapai program prioritas menggunakan asas Lingkaran Konsentris yaitu mengutamakan menyelesaikan lebih dahulu masalah internasional yang terdekat dengan wilayah Indonesia, dalam hal ini membereskan masalah-masalah di Asia Tenggara, lebih khusus hubungan bilateral dengan negara tetangga Singapura. Dan Departemen Luar Negeri juga menggunakan pendekatan intermestik yaitu memadukan penyelesaian masalah internasional kaitannya dengan masalah domestik. Asas intermestik dalam hubungannya hidup bertetangga baik, diselenggarakan dengan Diplomasi Total yaitu jalur diplomasi antar pemerintah (*state to state*) dan antar penduduk (*people to people*) dijalankan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah hubungan bilateral dengan Singapura<sup>10</sup>.

Karena posisi geografis Indonesia dan Singapura secara alami tidak bisa diubah (*Its Given By God*), masing-masing negara mempunyai geo strategi, geo ekonomi dan geo politik sendiri-sendiri yang bisa berselisih atau berpotensi konflik dan juga bisa berpotensi kerjasama saling menguntungkan. Karena itu upaya Indonesia dan Singapura menjaga hubungan bertetangga dengan baik, damai abadi, saling membantu pencapaian kepentingan nasionalnya selalu diupayakan optimal. Diplomasi total (menyeluruh aspek dan jalur diplomasi)

---

<sup>10</sup> Djumadi , *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia* , 2004

harus dijalankan Indonesia untuk mencapai kondisi hubungan bertetangga baik dengan Singapura. Singapura walaupun penduduknya tahun 2005 sekitar 4,3 juta orang (Indonesia 227 juta), indeks GDP (*gross domestic product*) per Capita 28.428 (Indonesia 4,446). Ekonomi Singapura maju dalam angka US Dolar 11.6764 (no. 42) dan Indonesia 28.7217 (no.25).<sup>11</sup>

Singapura merupakan Hub (pusat jaringan) jasa keuangan internasional, jasa perdagangan internasional dan Hub jasa teknologi komunikasi internasional yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan nasional Indonesia. Jika beberapa keunggulan yang dimiliki Singapura dapat diakses untuk dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh pemerintah dan element rakyat Indonesia, hal itu akan memberikan peluang meningkatnya jumlah pencapaian tujuan-tujuan kepentingan nasional Indonesia dalam pembangunan segala bidang.

Sementara itu globalisasi telah memicu dan menghadirkan berbagai peluang dan tantangan bersama ditingkat wilayah regional Asia Tenggara yang didalamnya ada Indonesia dan Singapura . dalam konteks ini kemitraan bilateral Indonesia dengan Singapura merupakan tuntutan alami agar hubungan Indonesia dan Singapura mampu memberikan kontribusi komplementaris dalam mencapai tujuan kepentingan nasional masing-masing.

---

<sup>11</sup> Aris Ananta, *Paradigma Pembangunan Indonesia*, Institut of Southeast Asian Studies, Jakarta, 2007, ha.27.

## 1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah adalah sebuah kepentingan atau tujuan atau cita-cita dari suatu negara yang umumnya bersifat vital yang harus diperjuangkan secara berkelanjutan baik di dalam ataupun di luar negeri. Kepentingan nasional terbagi atas dua kategori yaitu kepentingan praktis (jangka pendek) dan kepentingan kontinuitas (jangka panjang/berlanjut). Kepentingan nasional (*National Interest*), dalam konteks kepentingan jangka pendek/kepentingan praktis merupakan kebutuhan kepentingan suatu negara yang mendesak yang berhubungan dengan eksistensi kehidupannya dan bersifat seketika (*instans*), sedangkan kepentingan jangka panjang (kepentingan kontinuitas) merupakan kepentingan nasional yang diperoleh atas kontak dengan negara lain yang bersifat berkelanjutan (*kontinyu*). Pada dasarnya kepentingan nasional suatu negara adalah kemerdekaan (*independence*), integritas wilayah (*Territorial Integrity*), keamanan dan militer (*Military Defence Security*) dan perekonomian (*Economic Being*).<sup>12</sup>

Konsep kepentingan nasional digunakan dalam pendekatan penelitian kebijaksanaan luar negeri Indonesia. Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa strategi diplomasi suatu negara hendaknya didasarkan kepada kepentingan nasional yang nyata, bukan berdiplomasi karena alasan moral, legal dan idiologi. Hans J Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan negara adalah

---

<sup>12</sup> Salisbury & Gibson, "The Road to Foreign Policy", dalam Dahlan Nasution, *Politik Internasional: Konsep dan Teori*, Erlangga, Jakarta, 1989, hal. 72.

mengejar kekuasaan yaitu berusaha membentuk dan mempertahankan pengendalian terhadap negara lain.<sup>13</sup>

Untuk mengejar kepentingan nasional yang realistis tersebut suatu negara harus mempunyai kekuatan nasional yang dapat meliputi kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kemampuan industri, kesiapsiagaan dan kemampuan militer, karakter nasional, kualitas pemerintahannya dan kualitas diplomasi. Indonesia dan Singapura mempunyai elemen-elemen kekuatan nasional berbeda namun bisa saling melengkapi karenanya dapat dikerjesamakan demi kepentingan nasional masing-masing.

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton , mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut :

*“National Interest is the fundamental and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest of a state is typecally is highly generalized conception of these elements that constitute the state’s most vital needs. These included self preservations, independence , territorial integrity , military security, and economic weel-beeing.”*<sup>14</sup>

Kepentingan nasional adalah faktor dasar yang memandu pengambilan kebijaksanaan suatu negara dalam mengambil kebijaksanaan luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara pada umumnya dicerminkan oleh kebutuhan-kebutuhan vital sebuah negara agar bisa melangsungkan kehidupan

---

<sup>13</sup> Morgenthau Hans J & Kenneth W Thompson (ed), *Politik Among Nations*, Yayasan Obor Indonesia , Jakarta, 1990, hal. 180-218.

<sup>14</sup> Jack C Plano and Roy Olton , *The International Dictionary*, New York: Holt, Rinehart Winston , 1969, hal 128

rakyat dan pemerintahannya, kemerdekaan negara, integritas wilayah, kesejahteraan ekonomi.

Untuk menganalisa hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura konsep kepentingan nasional akan dihubungkan dengan kepentingan kerjasama bidang ekonomi, perdagangan, kepabeanan, kebutuhan modal investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan pariwisata, keimigrasian, kerjasama teknologi, keamanan wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut, penyelundupan narkoba. Berbagai prioritas kepentingan nasional yang hendak dicapai akan menjadi alternative pilihan yang paling menguntungkan , dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Dalam kaitan diatas, Indonesia masih akan menjadi negara yang memerlukan penanaman modal asing dari atau melalui Singapura , Indonesia memerlukan akses perdagangan internasional ke13 negara-negara yang terikat dengan *Free Trade Area* bilateral dengan singapura, Indonesia memerlukan lapangan kerja diluar negeri bagi sebagian warga negaranya, Indonesia memerlukan akses menangkap koruptor dan penjahat kriminal yang melarikan diri ke wilayah Singapura dan Indonesia memerlukan wisatawan asing yang mau ke Indonesia melalui Singapura. Sementara Singapura dapat memenuhi kepentingan nasional penyediaan tenaga kerja dari Indonesia, sumber bahan mentah dari Indonesia, Singapura memerlukan supplay bahan bangunan pasir, bahan kehidupan air tawar, Singapura memerlukan wilayah perluasan usaha industri dan investasi di kepulauan Riau Indonesia, keamanan Selat Malaka dari bajak laut tradisional, keamanan dari ancaman terorisme internasional.

Singapura memerlukan wilayah pemasaran produk industrinya dan produk import dari 13 negara *Free Trade Asian* yang mengikatnya.

## 2. Konsep Kerjasama Bilateral

Kerjasama adalah sebuah mekanisme atau tindakan yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu dalam mengatasi masalah bersama atau mencapai tujuan bersama atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>15</sup> Apabila ditinjau dari negara anggotanya kerjasama internasional dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu :

- a. Kerjasama yang diadakan oleh dua negara saja atau yang disebut dengan kerjasama bilateral.
- b. Kerjasama yang diadakan oleh lebih dari dua negara yang disebut dengan kerjasama multilateral.

Kerjasama bilateral (*bilateral relations*) adalah sebuah hubungan politik, sosial, budaya atau perekonomian diantara dua negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral, misalnya melalui perjanjian ekonomi-politik, pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Hubungan bilateral secara historis telah terjadi sebelum Perang Dunia I saat negara-negara yang menghadapi ancaman membentuk afiliasi yang disebut dengan “pakta”. Hubungan bilateral juga lebih efektif untuk dijalankan karena mekanisme tawar-menawar (*bargain mechanism*) hanya dilakukan dua negara

---

<sup>15</sup> “Terjemahan Dari The Definition of International Relation”, *Microsoft Encarta Dictionary*, Free Ensiklopedia CD Rom, 2005.

sehingga kedua negara tersebut dapat dengan mudah dan efektif dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya antara negara satu dengan negara yang lainnya.

Meskipun demikian, baik hubungan bilateral ataupun multilateral masing-masing ditujukan untuk memaksimalkan perolehan dan meminimalkan kerugian. Menurut Budiono Kusumohamidjojo kerjasama internasional adalah sikap kooperatif dalam menyelenggarakan politik luar negeri (bilateral) senantiasa dikendalikan oleh asumsi bahwa persoalan yang ada tidak dapat diatasi sepihak, atau sasaran tertentu tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Sikap kooperatif juga dapat bangkit bila ada perkiraan bahwa kerjasama akan membawa dampak yang menguntungkan bila dibandingkan dengan mengandalkan daya guna kekuatan sendiri. Pada umumnya juga disertai bahwa kerjasama internasional senantiasa membawa konsekuensi tertentu. Namun demikian kerjasama internasional senantiasa diusahakan justru karena manfaat yang akan diperoleh dalam kerjasama secara proposional adalah masih lebih besar daripada konsekuensi yang harus ditanggung”.<sup>16</sup>

Kerjasama internasional dan kepentingan nasional merupakan ibarat dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan, kesemuanya saling mendukung dan melengkapi. Pada era globalisasi sekarang ini disaat uniteralisme internasional semakin kuat hampir dapat dipastikan sebuah negara tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan negara lain. Hal inilah yang melatarbelakangi

---

<sup>16</sup> Kusumohamidjojo Budiono, *Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis*, Alumni Bandung, 1971, hal.33.

sebuah negara untuk menjalankan kerjasama dengan negara lain, termasuk di dalamnya kerjasama bidang pertahanan yang dimaksudkan untuk merealisasi kepentingan nasional.

Dalam perkembangannya makna harafiah tentang kepentingan nasional (*National Interest*) memang relatif diversifikasi atau terdapat berbagai perbedaan. Menurut tokoh realis klasik Hans Morgenthau (1905–1980) kepentingan nasional adalah usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Sedangkan menurut Holsti kepentingan nasional adalah :

“Serangkaian gagasan dari tujuan dan kebutuhan yang diterapkan oleh pembuat keputusan yang harus dijalankan ke dalam tindakan nyata oleh negara (bangsa) yang bersangkutan.”<sup>17</sup>

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional didalamnya terdapat beberapa unsur, hal ini dapat dilihat melalui pernyataannya yaitu :

“Kepentingan nasional sebagai tujuan mendasar serta faktor yang paling penting menentukan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan hidup bagi negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> KJ. Holsti, *Politik Internasional*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987, hal.7.

<sup>18</sup> Jack C Plano & Roy Olton, *The International Politic Dictionary*, NOLT Rine Hart ABC Clio, Winson Inc, Michigan University, New York, 1973, hal.127.

Berdasarkan pada pernyataan Jack C Plano dan Roy Olton diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional di dalamnya terdapat aspek integral penting yaitu kemerdekaan, intergritas teritorial, keamanan militer dan keseimbangan ekonomi. Dalam perkembangannya kerjasama bidang pertahanan juga mampu menjamin bukan hanya stabilitas nasional suatu negara, namun juga kedaulatan regional. Hal ini penting mengingat pada era globalisasi ancaman-ancaman yang terjadi telah berkembang secara transnasional.

Politik luar negeri pemerintahan Indonesia dalam melakukan kerjasama bilateral dengan berbagai pihak dengan cara menyeleksi yang dapat diandalkan dalam kerjasama. Seperti hubungan diplomatik Republik Indonesia-Singapura dalam kerjasama bilateral ada dimensi inti yaitu :

1. Keselarasan tujuan : tujuan kedua belah pihak cocok satu sama lain sebatas tujuan aliansi maupun tujuan rasional kedua belah pihak dapat tercapai bersama.
2. Adanya keuntungan strategis yang harus terdapat manfaat yang dapat dirasakan kedua belah pihak.
3. Adanya saling ketergantungan yaitu setiap mitra bilateral tergantung satu sama lain dan hubungan ini harus dikelola secara rasional sehingga dibatasi seminimal mungkin , sedangkan kerjasama berjalan dengan baik.
4. Adanya komitmen yaitu kepercayaan sebagai faktor penting bagi kelangsungan hidup jangka panjang sebuah aliansi dan vital bagi kelangsungan kerjasama diantara mitra-mitra aliansi.

Apabila salah satu dari dimensi ini tidak ada, maka berbagai masalah kecildan biasa dapat mengemuka dan dapat menjadi konflik. Apabila konflik yang tidak diinginkan tidak timbul maka setiap pihak akan berniat melakukan kerjasama. Disamping itu kerjasama tidak terjadi jika kerugian yang akan ada tidak sebanding (lebih besar) dengan keuntungan yang akan diraih pada kerjasama akhir.

Berdasarkan kondisi regional diatas, maka untuk membangun hubungan bilateral Indonesia–Singapura yang bersahabat, yang produktif, yang seimbang, yang saling menguntungkan dan untuk mengatasi tantangan keamanan regional dan terorisme internasional, kedua pemerintah perlu membangun dasar–dasar kokoh yang dapat berwujud diantaranya perjanjian–perjanjian bilateral dibidang-bidang yang selama tahun 2004-2007 menjadi ganjalan salah satu atau kedua belah pihak.

Dasar hubungan bilateral yang kokoh dapat dibangun jika kepentingan masing-masing negara dapat diakomodasi atau dapat dipenuhi secara timbal balik. Dalam hal ini kepentingan nasional Indonesia yang diprogramkan tertulis dalam buku Rencana Pembangunan Nasional oleh BAPPENAS tahun 2004-2009 dan yang dijabarkan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia sebagai program kerja dan tujuan politik luar negeri Indonesia. Kepentingan nasional yang dijabarkan dengan prioritas program oleh Deplu, harus dicapai dengan memanfaatkan keunggulan Singapura, antara lain seperti sumberdaya dana investasi, sumber daya akses jaringan perdagangan bebas (*Free Trade Asian*)

internasional, sumber daya jaringan teknologi informasi, sumber daya pariwisata dan sumber daya lapangan pekerjaan.

Singapura juga mempunyai kepentingan nasional seperti perasaan aman bertetangga dengan Indonesia, kebebasan berusaha untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan kemampuan melindungi apa yang telah dicapainya dari ancaman luar negeri. Kepentingan nasional yang pokok dan vital tersebut selalu ingin dicapai, dipertahankan, dikembangkan dengan mendayagunakan atau memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dan menjadi keunggulan Indonesia seperti sumber tenaga kerja, sumber bahan baku untuk industri, sumber pasar produksi ataupun produk import Singapura, sumber tempat berinvestasi bagi investor dari Singapura. Bertemunya spectrum berbagai kepentingan nasional Indonesia dan spectrum kepentingan nasional Singapura yang saling mendukung, saling melengkapi, saling menguntungkan, akan bisa menjadi perekat hubungan bilateral bertetangga baik yang awet, tahan lama, tidak mudah putus antara kedua belah pihak, baik Indonesia ataupun Singapura.

#### **E. Hipotesa**

Berdasarkan pada paparan kerangka dasar teori diatas, penulis dapat menarik hipotesa sebagai berikut :

Bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kebijaksanaan hidup bertetangga baik dengan Singapura adalah Indonesia selalu berusaha

mengembangkan dialog dalam mengatasi perselisihan dan memperluas spektrum hubungan kerjasama bilateral saling menguntungkan dengan Singapura di berbagai bidang kehidupan dengan ikatan perjanjian-perjanjian internasional.

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesa, tentang upaya-upaya yang dilakukan Pemerintahan Indonesia terhadap Singapura pada era Susilo Bambang Yudhoyono agar hubungan bilateral keduanya dapat saling mendukung dalam pencapaian tujuan kepentingan nasional antara Indonesia.
2. Dengan penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang dinamika hubungan bilateral antara Indonesia-Singapura, khususnya pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
3. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi persyaratan lulus sarjana strata satu ilmu politik dengan spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **G. Metode dan Teknik Penulisan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berkaitan dengan sifat data yang sekunder yaitu metode kualitatif, yaitu sebuah metode

analisa data-data yang sifatnya non-angka, data-data ini berupa pernyataan, berita, laporan. Jika terdapat tabel, skema dan diagram yang sifatnya kuantitatif, hal ini hanya untuk memperkuat deskripsi analisa saja, dan bukan merupakan hasil akhir.<sup>19</sup> Sementara teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Menurut Sutrisno Hadi, studi kepustakaan adalah sumber kepustakaan yang penting karena didalamnya terdapat kondensasi (kumpulan) dari sebagian terbesar penyelidikan yang pernah dilakukan orang.<sup>20</sup>

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan.

Data-data yang telah dikumpulkan merupakan data-data sekunder, yang artinya dalam penulisan ini penulis tidak menjalankan observasi (penelitian) langsung namun lebih mengacu pada sumber-sumber yang telah ada, yang diolah melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Data-data dikumpulkan dan diolah melalui :

1. Buku-buku
2. Surat Kabar dan Majalah
3. Jurnal Sosial Politik dan Artikel

---

<sup>19</sup> Catherine Cassel and Gillian Symon (editor), *Qualitative Methods in Organizational Research*, Sage Publications, London, 1994, hal.3-4.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hal. 57.

4. Internet (*Web Site*).

## **H. Jangkauan Penelitian**

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi penulisan ini pada tahun 1999-2007. Dipilih periode tahun tersebut karena penulis berpendapat periode waktu tersebut dapat merepresentasikan tentang berbagai dinamika orientasi hubungan bilateral Indonesia-Singapura mulai dari rezim Abdurahman Wakhid (Gusdur), hingga Megawati Soekarnoputri, serta merepresentasikan periode waktu sebagai bagian dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintahan Indonesia terhadap Singapura pada era Susilo Bambang Yudhoyono agar hubungan bilateral keduanya dapat saling mendukung dalam pencapaian tujuan kepentingan nasional kedua negara, baik Indonesia ataupun Singapura, sekaligus menjadi tahun akhir bagi penulis dalam memperoleh data-data yang tersedia. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevanan dengan tema yang sedang dibahas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab yang terbagi masing-masing sebagai berikut :

**Bab I** merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar

teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode dan teknik penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** membahas tentang dinamika kepentingan nasional Indonesia terhadap Singapura pada bidang politik, sosial, ekonomi dan pertahanan-keamanan.

**Bab III** membahas tentang dinamika permasalahan dan kendala-kendala yang mengemuka bagi hubungan bilateral Indonesia-Singapura dari rezim Megawati Soekarnoputri pada bidang politik, perekonomian, sosial-budaya, serta pertahanan-keamanan.

**Bab IV** merupakan bab pembuktian hipotesa yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan Pemerintahan Indonesia terhadap Singapura pada era Susilo Bambang Yudhoyono agar hubungan bilateral keduanya dapat saling mendukung dalam pencapaian tujuan kepentingan nasional antara Indonesia pada bidang sosial-politik, perekonomian, serta pertahanan-keamanan pada periode tahun 2004-2007.

**Bab V** berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.